

Mirip KKN, Siswa-Siswi SMK di Jabar Dilibatkan Membangun Desa

BANDUNG (IM)- Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) mencanangkan program SMK Membangun Desa. Program ini ditujukan untuk mendorong pembangunan desa dengan melibatkan andil dari siswa-siswi SMK.

Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi mengatakan, nantinya setiap SMK di Jabar mendampingi dua desa binaan. Ada pun kolaborasi yang dilakukan ialah digitalisasi pelayanan desa, dan mengajarkan kompetensi SMK kepada masyarakat desa.

"Digitalisasi pelayanan desa ini artinya kalau desa belum punya internet, harus dilakukan percepatan. Ajarkan dan terapkan pelayanan desa berbasis digital," kata Dedi, Senin (5/4).

Sementara pengajaran keahlian kepada masyarakat diajarkan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) warga desa. Misalnya, dengan mengajarkan keahlian di bidang otomotif agar warga desa suatu saat bisa membuka bengkel.

"Dengan begitu maka ada upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi. Atau siswa SMK

yang paham dengan teknik las misalnya, silakan mengajarkan kepada masyarakat," katanya.

Tak hanya itu, ujar Dedi, siswa-siswi SMK juga dapat terlibat dalam pembangunan infrastruktur di desa. Pelaksanaannya mirip seperti KKN mahasiswa. "Anak SMK bisa memberikan sentuhan pada infrastruktur yang dibangun. Mulai dari desain dan pembangunannya," kata dia.

Program SMK Membangun Desa ini, saat ini baru direstikan di SMK Karya Nasional, Kabupaten Kuningan pada Jumat (2/4/2021) lalu. SMK tersebut telah menjalin kerja sama dengan 27 desa di Kabupaten Kuningan, dengan restu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Dedi pun mengapresiasi inisiatif gerakan SMK Membangun Desa, yakni Direktur Forum Peduli Pendidikan Pelatihan Menengah Kejuruan Indonesia (FP3MKI), Dr. Marlock.

"Ke depan saya berharap dan optimistis program SMK Membangun Desa diikuti oleh semua SMK di Jabar," ujar Dedi. ● **pur**

Gibran akan Karantina Pemudik di Solo Techno Park

SOLO (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyiapkan Solo Techno Park (STP) untuk masyarakat yang nekat mudik saat Lebaran nanti. Lokasi yang berada di belakang kampus UNS (Universitas Sebelas Maret), Kecamatan Jebres tersebut telah beberapa kali digunakan untuk ruang isolasi.

"Tempat karantina ada, disiapkan. Nanti teknisnya pak Sekda," kata Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo, Senin (5/4).

Dia menegaskan, kebijakan larangan mudik tetap tidak berubah, sesuai keputusan pemerintah pusat. Termasuk larangan mudik bagi ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan Pemkot Solo yang ia sampaikan beberapa waktu lalu.

"Aturannya tetap dilanjutkan, tidak ada perubahan banyak. Mudik tetap tidak disarankan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Ahyani menjelaskan, pihaknya tetap mengacu pada pemerintah pusat, terkait larangan mudik. Jika ada masyarakat yang tidak patuh, pihaknya sudah menyiapkan lokasi untuk karantina. Jika pada tahun sebelumnya, para pemudik ditampung di Graha Wisata, tahun ini dialihkan ke STP.

"Kita tetap merujuk dari pemerintah pusat, itu kan dilarang. Nanti kalau sampai Solo ya kita siapkan tempat untuk

karantina di di Solo Techno Park," terangnya.

Dia menyampaikan, Pemkot akan memaksimalkan STP terlebih dahulu sebelum mencari tempat karantina lainnya. Di lokasi STP, menurutnya, bisa menampung 200 lebih tempat tidur. Untuk yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19 akan dibawa ke Asrama Haji Donohudan, Boyolali.

Bagi yang nekat mudik, lanjut Ahyani, diwajibkan membawa surat keterangan sehat, hasil swab dan lainnya dari dinas terkait. Pihaknya juga akan mengoptimalkan Jogo Tonggo untuk mendeteksi kedatangan pemudik.

"Jogo Tonggo nanti yang akan melaporkan ke Satgas Covid-19, nanti kalau ada pemudik kita jemput," jelasnya.

Untuk mempersempit ruang gerak pemudik, di perbatasan juga akan dilakukan screening. Screening akan dilakukan oleh tim cipta kondisi, yang terdiri dari kepolisian, TNI dan Pemkot Solo (Satpol PP). Pihaknya juga menyiapkan armada di terminal maupun stasiun untuk menjemput warga luar kota yang nekat mudik.

"Screening akan dilakukan menjelang Lebaran, sesuai petunjuk dari pemerintah pusat. Nanti lihat petunjuk pusat, waktunya kapan. Pusat kan tanggal 6-17 itu, nanti kita ikuti saja, masih nunggu waktunya," pungkas Ahyani. ● **pra**



IDN/ANTARA

WISATA RELIGI SITU LENGKONG PANJALU

Wisatawan menaiki perahu menuju Pulau Nusa Gede untuk berziarah di Situ Lengkong, Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (5/4). Situ Lengkong merupakan kawasan wisata religi atau wisata ziarah makam Prabu Hariang Kencana Borosngora atau Sayid Ali Bin Muhammad Bin Umar, dengan luas area sekitar 60 hektare.

Ini Alasan Dinkes Kab. Bogor Tolak Vaksinasi Covid 19 Drive Thru

CIBINONG (IM)- Walaupun sanggup melaksanakan penyuntikan Vaksin Covid 19 secara drive thru, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor lebih memilih cara konvensional dalam penyuntikan vaksin tersebut.

"Pemkab Bogor bisa saja seperti Pemkot Bogor yang melakukan vaksinasi drive thru di komplek Stadion Gor Pajajaran, Kecamatan Tanah Sareal beberapa waktu lalu untuk menghindari antrean maupun kerumunan, namun karena harus ada screening maka kami lebih memilih cara konvensional dalam penyuntikan vaksin Covid 19," ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Achmad Zainudin, kemarin.

Mantan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Ciawi ini menerangkan bahwa syarat masyarakat disuntik vaksin Covid 19 ialah dalam keadaan sehat seperti tekanan darah normal, tidak dalam perawatan sakit kanker dan lainnya.

"Kalau swab atau rapid test itu normal saja kalau drive thru karena tak ada syarat masyarakatnya dalam keadaan sehat, ada etika medis yang harus kita laksanakan karena bisa saja masyarakatnya pingsan atau

dampak negatif lainnya hingga kita harus melaksanakan screening dan memberinya waktu 15 sampai 30 menit hingga lebih baik kalau kita menggunakan cara konvensional," terangnya.

Zen sapaan akrabnya menuturkan ketimbang berinovasi tetapi melanggar etik medis, lebih baik kita memikirkan cara konvensional," terangnya.

Zen sapaan akrabnya menuturkan ketimbang berinovasi tetapi melanggar etik medis, lebih baik kita memikirkan cara konvensional," terangnya.

Ia menjelaskan fasilitas untuk menjaga stamina vaksinator terlatih juga dibutuhkan, apalagi para vaksinator tidak hanya bertugas di pusat kota tetapi juga di pinggiran kota. "Tempat penyuntikan vaksin Covid 19 bukan hanya di Gedung Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, klinik swasta dan rumah sakit tetapi juga 101 Puskesmas yang tersebar di 40 kecamatan. Kita juga harus memikirkan stamina dan keselamatan para vaksinator ini agar mereka juga terbebas dari wabah Covid 19," jelasnya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

WAKSINASI BAGI ATLET PON JABAR

Sejumlah atlet menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mendapatkan vaksin COVID-19 di Sport Jabar Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi 1.421 personel kontingen Pelatda PON dan Peparnas Jawa Barat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 sebagai upaya persiapan atlet menghadapi PON XX di Papua.

Revitalisasi Terminal Baranangsiang Bogor Dimulai Tahun Depan

Pemkot Bogor berencana meletakkan ujung lintas rel terpadu (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) dan trem di kawasan Baranangsiang. Bahkan, tidak jauh dari Baranangsiang juga terdapat Tol Jagorawi. Sehingga bisa dipastikan pusat transportasi bakal bertumbuh di kawasan tersebut.

BOGOR (IM)- Revitalisasi Terminal Baranangsiang ditargetkan dimulai pada tahun 2022 yang sebelumnya tertunda 9 tahun. Rencananya, Baranangsiang tak hanya berfungsi sebagai terminal, tetapi juga menjadi bagian kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan kawasan komersial.

Direktur PT Pankacarya Grahatama Indonesia (PGI), Sumarsono Hadi mengatakan, pengembangan terminal Ba-

ranangsiang memang sempat tertunda selama sembilan tahun. Dalam surat keputusan yang lama, PGI mendapatkan jatah selama 30 tahun sebagai hak untuk mengelola terminal.

Namun, karena hingga kini pembangunan pengembangan terminal Baranangsiang tak kunjung terealisasi, dirinya pun berupaya untuk menggeser waktu pengelolaan terminal yang mulanya dihitung pada 2012, kini bergeser menjadi 2021.

"Apakah bisa yang 30 ta-

hun digeser? Dari awalnya 2012 digeser starting-nya (mulainya) menjadi 2021," paparnya, Senin (5/4).

Sumarno mengatakan, saat ini permasalahan tersebut sudah mendapatkan titik terang. Berdasarkan hasil Legal Opinion (L.O) dari Kejaksaan Agung (Kejagung), PGI mendapatkan jatah untuk mengelola Terminal Baranangsiang selama 30 tahun secara utuh. Untuk memulai pembangunan, pihak kontraktor masih menunggu pembaruan IMB.

Sumarno menambahkan, pembangunan terminal sendiri secara utuh membutuhkan waktu selama empat tahun lamanya. Ia pun menargetkan dengan penyesuaian izin mendirikan bangunan (IMB) rampung, maka pembangunan dapat dilakukan pada tahun depan.

Revitalisasi Terminal Baranangsiang Bogor yang akan dilaksanakan sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres)

55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RIJT) tahun 2018-2029.

Selain itu, pergeseran waktu pengelolaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah atau lebih dikenal BGS. "Dan setelah kami berkonsultasi dengan berbagai pihak, akhirnya bisa digeser," kata Sumarno.

Ke depan, kata dia, bagaimana melakukan upaya percepatan untuk merealisasikan pengembangan terminal Baranangsiang menjadi kawasan TOD.

Selain menunggu pembaruan IMB, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2012 dengan kondisi dan fungsi saat ini berbeda, salah satunya dengan keberadaan objek online.

Pemkot Bogor berencana meletakkan ujung lintas rel terpadu (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) dan trem di kawasan Baranangsiang.

Bahkan, tidak jauh dari Baranangsiang juga terdapat Tol

Jagorawi. Sehingga bisa dipastikan pusat transportasi bakal bertumbuh di kawasan tersebut. "Tentunya harus ada penyesuaian fungsi-fungsi terhadap rancang bangun," katanya.

Sumarno berharap, rencana tersebut mendapatkan persetujuan dari kepala daerah Kota Bogor. Sedangkan syarat teknis yang disampaikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BJTJ), PGI hanya mengikuti saja.

"PT PGI hanya tinggal desain saja. Kalau bisa cepat, kami juga siap gambar desain, hitung berapa kontribusi untuk negara, begitu ditetapkan bisa," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mulai menjalin kembali komunikasi terkait dengan rencana pembangunan Terminal Tipe A Baranangsiang, Kota Bogor.

Rencananya, terminal yang berada di tengah Kota Bogor itu akan dibangun menjadi kawasan berorientasi Transit Oriented Development (TOD). ● **pra**

Menteri PUPR Targetkan Konstruksi Tol Cisumdawu Tuntas Akhir 2021

JAKARTA (IM)- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) tuntas seluruhnya pada akhir tahun ini.

Menteri Basuki meminta seluruh pihak terus berkoordinasi dan berupaya keras untuk mempercepat pembebasan lahan, sehingga penyelesaian Tol Cisumdawu sesuai target akhir 2021. "Masalah pembebasan lahan ini saya minta dikeroyok agar konstruksinya bisa cepat bergerak, karena konstruksi hanya dapat berjalan cepat jika lahan sudah tersedia," kata Menteri PUPR dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (5/4).

Tol Cisumdawu sepanjang 60,10 km ini akan terhubung dengan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati dan diharapkan tuntas seluruhnya di akhir 2021 untuk mendukung fungsi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Untuk mempercepat pengadaan lahan, Kementerian PUPR melalui Satker Pembangunan Tol Cisumdawu, Ditjen Bina Marga terus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan instansi

terkait lainnya.

Mekanisme pembebasan lahan sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan bilamana tidak terjadi kesepakatan harga lahan yang telah ditetapkan oleh penilai independen dilakukan konsinyasi atau titip uang ganti rugi di pengadilan.

Berdasarkan data untuk Seksi I Cileunyi - Rancakalong sepanjang 11,45 km konstruksinya mencapai 71,59 persen dengan progres lahan 97,74 persen. Selanjutnya Seksi II Rancakalong - Sumedang sepanjang 17,35 km progres konstruksinya 91,13 persen dengan capaian lahan 95,93 persen.

Untuk Seksi 3 dari Sumedang ke Cimalaka sepanjang 4,05 km konstruksinya telah rampung 100 persen. Kemudian pembangunan Seksi 4 Cimalaka - Legok sepanjang 8,20 km dan Seksi 5 Legok - Ujungjaya sepanjang 14,9 km saat ini telah dimulai pekerjaan site clearing dengan progres lahan masing-masing 39,71 persen dan 38,00 persen.

"Berdasarkan laporan, pada April lahan sudah bisa 70% untuk Seksi 4, sehingga konstruksi kita minta Mei sudah bisa bergerak," ujar Menteri Basuki.

Selanjutnya Seksi 6 Ujungjaya - Dawuan sepanjang 6,06 km telah dimulai konstruksi pada Seksi 6A dengan progres 25,20 persen dan Seksi 6B sebesar 2,30 persen. Untuk

pembebasan lahan mencapai 87,53 persen.

Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUB). Dari enam seksi, Seksi 1 dan 2 dikerjakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari viability gap fund (VGF) guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut.

Kemudian Seksi 3-6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Citra Karya Jabar Tol (CKJT) dengan nilai investasi Rp8,41 triliun.

Dengan beroperasinya seluruh ruas Jalan Tol Cisumdawu dan nantinya terhubung dengan Jalan Tol Akses BIJB Kertajati akan mengurangi waktu tempuh dari Bandung sekitar 3 jam menjadi 1 jam. Dengan konektivitas yang semakin meningkat maka operasional bandara akan semakin meningkat dan kompetitif, sehingga diharapkan bisa menggantikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

Kehadiran Tol Cisumdawu sekaligus mendukung pengembangan kawasan "segitiga emas" Cirebon-Subang-Majalengka (Rebana) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan baru, serta menjadi salah satu tol dengan pemandangan yang indah seperti Tol Bawen-Salatiga karena menyuguhkan panorama pegunungan di Bumi Priangan. ● **pur**



IDN/ANTARA

BANJIR BANDANG FLORES TIMUR

Warga mengevakuasi korban akibat banjir bandang di Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Senin (5/4). Berdasarkan data BNPB hingga senin siang, korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Flores Timur mencapai 68 jiwa.

Siswa Disabilitas Dilatih Evakuasi Bencana

CIBINONG (IM)- Ingin siswa-siswinya bisa mengantisipasi bencana alam banjir, Siliwangi School Inklusi Vocasi International Dissabilitas yang berlokasi di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor melatih keterampilan anak didiknya untuk evakuasi.

"Bekerja sama dengan Karang Taruna Kecamatan Cibinong, didampingi orang tua dan guru, 20 orang lebih siswa-siswi disabilitas kami latih evakuasi bencana alam banjir, mulai dari memakai pelampung, memakai helm, menaiki perahu karet dan mendayung," ucap Wakil Koordinator Siliwangi School Inklusi Vocasi International Dissabilitas, Prama Dharmasakti kepada wartawan, Senin, (5/4).

Ia menerangkan walaupun terlihat sederhana, karena yang dilatih evakuasi bencana alam adalah siswa-siswa disabilitas, namun tidak mudah bagi guru, pendidik maupun instruktur. "Tidak mudah melatih evakuasi bencana alam kepada penyandang disabilitas apalagi jenis kelainannya bermacam-macam. Mereka awalnya takut melihat sungai namun setelah dibujuk dan diberi pengertian, Alhamdulillah mereka sudah mulai bisa mengevakuasi dirinya bila terjadi banjir," terangnya.

Prama, sapaan akrabnya, me-

nurkan selain Prama, para siswa-siswi disabilitas ini juga akan dilatih mengantisipasi bencana alam angin kencang, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran dan lainnya.

"Tujuan melatih evakuasi ragam bencana alam ini karena kami tak ingin jika terjadi bencana alam para siswa-siswi disabilitas menjadi korban luka maupun jiwa, kedepan kami akan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor untuk ikut memberikan pelatihan tersebut," tutur Prama.

Selain melatih mengantisipasi atau mengevakuasi bencana alam, para siswa-siswi disabilitas juga diajarkan ketrampilan lainnya seperti membuat janur dari daun pohon kelapa. "Kami yang berada di bawah naungan organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bogor juga mengajarkan cara membuat janur hingga mereka nantinya bisa mendapatkan penghasilan dari keterampilannya," sambungnya.

Prama melanjutkan karena dalam menggerakkan aneka kegiatan di Siliwangi School Inklusi Vocasi International Dissabilitas butuh biaya yang tak sedikit, pihaknya pun berharap dapat urutan tangan dari pihak swasta ataupun perorangan. ● **gio**

Kota Bogor Pastikan Distribusi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran

BOGOR (IM)- Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bogor akan segera menjadwalkan operasi pengawasan ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar jelang bulan Ramadhan. Di samping itu, saat ini Disperindag Kota Bogor masih bertugas untuk mengawasi distribusi Elpiji 3 kilogram.

Kadisperindag Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan, saat ini Disperindag Kota Bogor sedang mengencakan imbauan mengenai target distribusi Elpiji 3 kilogram untuk masyarakat miskin. "Operasi pasar kami belum pastikan dulu, kami masih terus koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Jadi kita masih dapat penugasan untuk pengawasan distribusi Elpiji 3 kilogram, itu kan tabung bersubsidi untuk warga miskin," kata Ganjar, kemarin.

Sejauh ini, sambung Ganjar, Kota Bogor sendiri menemuka jatah tabung Elpiji 3 kilogram sebanyak

41 ribu tabung. Dari situ, Disperindag bertugas untuk memastikan ribuan tabung Elpiji bersubsidi tersebut tepat sasaran, untuk warga yang kurang mampu.

Oleh karena itu, Ganjar mengimbau masyarakat untuk tidak segan melapor ke Disperindag Kota Bogor, apabila menemukan pelaku usaha besar seperti restoran dan rumah makan yang menggunakan Elpiji 3 kilogram. "Tugas Disperindag memastikan itu (Elpiji 3 kilogram) tepat sasaran, jadi benar-benar untuk warga tidak mampu. Jika teman-teman ada informasi pelaku usaha besar yang pakai tabung Elpiji 3 kilogram, lapor saja ke kita," tegasnya.

Dia menambahkan, pengguna Elpiji bersubsidi tersebut, seharusnya merupakan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berhak. "Jadi itu benar-benar untuk UMKM, mereka yang dibolehkan memakai. Ini kita sedang gencar dulu pengawasan di situ," pungkasnya. ● **gio**